

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Asia pasifik adalah kawasan yang beranggotakan negara-negara yang memiliki keberagaman rezim dan sistem pemerintahan. Lembaga internasional pemerhati sistem pemerintahan pada negara di seluruh dunia yaitu *The Economist Intelligent Unit* pada tahun 2018 membagi penerapan demokrasi pada suatu negara dalam empat tingkatan antara lain: *full democracy* atau demokrasi penuh, *flawed democracy* atau demokrasi cacat, *hybrid regime* atau rezim campuran, dan *authoritarian* atau otoritarian. Menurut laporan *The Economist Intelligent Unit* Pada tahun 2018 di kawasan asia pasifik tercatat bahwa ada negara dengan sistem demokrasi penuh yaitu; Australia dan Selandia Baru. Negara dengan sistem demokrasi cacat yaitu; Korea Selatan, Jepang, Timor-Leste, Malaysia, Philipina, Mongolia, Indonesia, Singapura dan Papua New Guinea. Negara dengan sistem rezim campuran seperti; Fiji dan Thailand. Serta negara dengan sistem otoriter yaitu; Myanmar, Kamboja, China, Vietnam, Laos dan Korea Utara.

Penerapan demokrasi pada suatu negara akan berdampak kepada kinerja perekonomian negara yang bersangkutan, seperti pendapat Acemoglu (2019) yang menyatakan bahwa penerapan sistem yang demokratis pada suatu negara akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pendapat ini didasari oleh studinya menggunakan panel negara-negara selama 50 tahun. Bukti menunjukkan bahwa demokrasi menyebabkan pertumbuhan serta memiliki efek signifikan dan besar.

Temuan ini menjelaskan bahwa negara yang berubah dari non-demokratis menjadi demokratis memperoleh PDB perkapita lebih tinggi sebesar 20 persen dalam 25 tahun kedepan dari pada negara yang tetap pada kondisi non-demokratis.

Pada sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa hubungan demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk yang tidak langsung. Seperti pendapat Barro (1996) bahwa demokrasi tidak serta merta langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, melainkan demokrasi hanya mempengaruhi variabel-variabel yang diyakini mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri modal sosial dan modal manusia yang dimediasi oleh kualitas pemerintah. Hanya dengan sistem politik demokrasi, ketiga faktor tersebut dapat ditopang untuk memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Sistem politik demokratis diperlukan guna melahirkan pemerintahan yang dapat membuka ruang dan keleluasaan dalam kegiatan ekonomi. Intinya adalah selama demokrasi dapat meningkatkan kualitas pemerintah maka akan berpengaruh terhadap total faktor produksi dan pertumbuhan PDB perkapita.

Serta ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada hubungannya antara demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi. Seperti pendapat Tom Friedman (2009) yang berpendapat bahwa non-demokrasi satu partai tentunya memiliki kekurangan, akan tetapi disaat negara tersebut dipimpin oleh sekelompok orang yang pandai, maka ini tentunya akan memberikan keuntungan. karena pengambilan kebijakan yang sangat penting pada sistem demokrasi biasanya akan berhadapan dengan hambatan-hambatan secara politis, namun dalam sistem satu partai atau otoriter, kebijakan yang penting dapat dipaksakan. Pendapat ini sejalan dengan temuan

Gerring (2005) yang menyatakan bahwa pengaruh demokrasi pada pertumbuhan ekonomi dalam lima dekade terakhir adalah negatif atau tidak ada.

Jika kita sandingkan data pertumbuhan ekonomi negara-negara kawasan asia pasifik oleh Bank Dunia pada tahun 2018 dengan data indeks demokrasi negara-negara kawasan asia pasifik oleh *The Economist Intelligent Unit* pada tahun 2018, maka dapat kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi diperoleh oleh negara Kamboja dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7,47% yang menerapkan sistem otoriter, selanjutnya adalah negara Mongolia yang menerapkan sistem demokrasi cacat dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7,25%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada negara yang menerapkan sistem demokrasi penuh seperti Selandia Baru hanya mencapai angka 3,12% dan Australia hanya mencapai angka 2,95%. Pada kawasan asia pasifik, negara dengan penerapan sistem demokrasi penuh hanya memperoleh pertumbuhan sekitar 3% sedangkan negara dengan sistem otoriter seperti: Myanmar, Kamboja, China, Vietnam dan Laos memiliki pertumbuhan diatas 6% namun negara Korea Utara yang juga menerapkan sistem otoriter memiliki pertumbuhan yang sangat rendah yaitu dibawah -4%. Ini menunjukkan bahwa penerapan sistem demokrasi pada suatu negara tidak mutlak menentukan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain semakin demokratis sistem yang diterapkan suatu negara belum tentu negara tersebut memiliki pertumbuhan yang tinggi dari negara yang tidak demokratis.

Interaksi kondisi demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara sudah lama menjadi diskursus tersendiri bagi kalangan ilmuwan karena masih melahirkan berbagai pandangan dan kesimpulan (lihat John Helliwel 1992; Robert

Barro 1996). Tentunya mengkaji interaksi antara demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi pada kawasan asia pasifik akan menjadi menarik karena pada kawasan ini terdapat semua kategori penerapan demokrasi menurut *The Economist Intelligent Unit* yaitu demokrasi penuh, demokrasi cacat, rejim campuran dan otoriter. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik mengkaji bagaimana interaksi dan pengaruh variabel demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada kawasan asia pasifik.

1.2. Rumusan Masalah

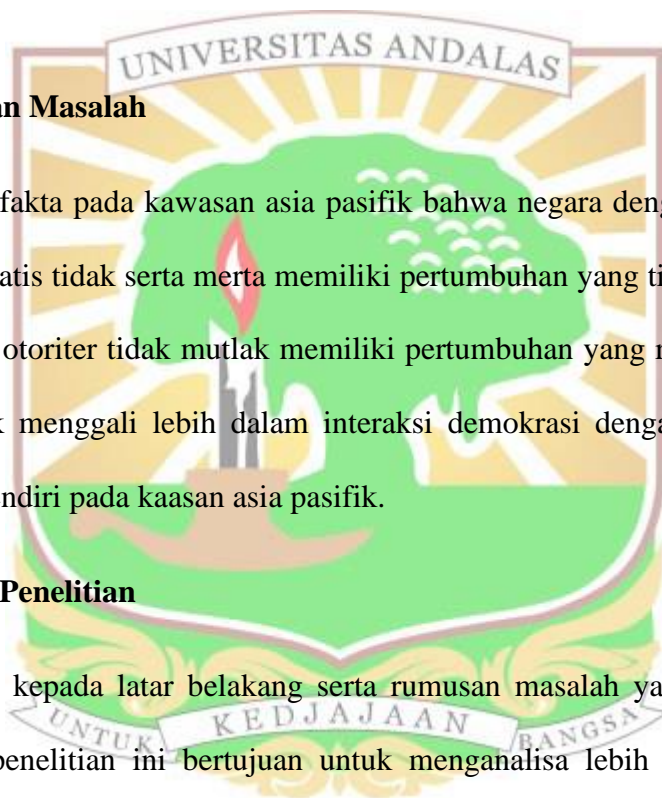
Melihat fakta pada kawasan asia pasifik bahwa negara dengan sistem yang paling demokratis tidak serta merta memiliki pertumbuhan yang tinggi dan negara dengan sistem otoriter tidak mutlak memiliki pertumbuhan yang rendah, tentunya menarik untuk menggali lebih dalam interaksi demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri pada kawasan asia pasifik.

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada latar belakang serta rumusan masalah yang disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa lebih dalam interaksi kondisi demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara kawasan asia pasifik.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab 1 berisikan tentang penjelasan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan.



Bab 2 berisikan tentang uraian landasan teori yang digunakan dalam melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang akan diteliti, serta kajian pustaka, pada bagian ini dipaparkan tentang kajian literatur dan penelitian terkait sebagai acuan dalam melakukan penelitian.

Bab 3 berisikan uraian tentang metode yang penulis gunakan dalam penelitian, definisi operasional variabel serta metode analisis yang diaplikasikan dalam penelitian.

Bab 4 berisikan tentang uraian deskripsi variabel penelitian

Bab 5 berisikan tentang uraian dan penjelasan hasil analisis serta pembahasan yang menjadi pokok penelitian.

Bab 6 berisikan kesimpulan

